



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWAN AGUNG KUSUMA PRANATA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI
3. NHK : 136810

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.745.000.000**

1. Tanah Seluas 399 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 233 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 50.000 m2 di KAB / KOTA TANGGAMUS, Rp. 1.250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. Tanah Seluas 183 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 109.800.000
6. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
7. Tanah Seluas 126 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 75.600.000
8. Tanah Seluas 116 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 69.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **159.000.000**

1. MOTOR, HONDA LEGENDA SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000



2. MOTOR, YAMAHA ILB SEPEDA MOTOR RODA 2 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, MERCY E 230 MANUAL Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU AYLA 1,2 X AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	358.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	43.622.445
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	5.305.922.445
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.305.922.445

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.